SINERGISITAS PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENGEMBANGAN DESA WISATA
(Studi Di Desa Wisata Adat Suku Osing Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)

Oleh:

Agista Ul Hakim Paxi Permadi (1410511053)
Pembimbing: Dr. Emy Kholifah R, M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata 49 Telp/Fax (0331) 336728 (112) / 337957 Kotak Pos 104 Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang Sinergisitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Upaya Pengembangan Desa Wisata (Studi Di Desa Wisata Adat Suku Osing Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi) yang meliputi Pemerintah Pusat, Daerah, dan Desa serta mendeskripsikan bentuk kerjasama atau sinergisitas Pemerintah dengan masyarakat dalam mengembangkan Desa Wisata Adat Kemiren. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data di peroleh data primer dan sekunder. Penggumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi menggunakan *purposive sampling*. Analisis menggunakan analisis data model interaktif yang meliputi, *Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Verifikasi Data.* Dalam sinergisitas pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengembangan Desa Wisata Adat Kemiren. Terdapata 3 bentuk sinergisitas: (1). Sinergisitas Kebijakan tentang Desa Wisata dari Pemerintah Pusat sampai kepada Pemerintah Desa (2). Sinergisitas Pemeberdayaan Masyarakat Lokal tentang SDM dan juga merupakan bentuk implementasi dari kebijakan yang telah dibuat (3). Sinergisitas kegiatan swadaya masyarakat yang merupakan kegiatan tradisi Masyarakat Osing di Kemiren dan digagas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menjadi agenda Festival tahunan agar dapat dipromosikan kepada wisatawan. Dengan adanya tiga bentuk sinergistas, bahwa Pemerintah dan Masyarakat telah berupaya untuk mengembang Desa Wisata untuk kesejahteraan masyarakat serta diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dan melibatkan secara langsung agar dapat merasakan pembangunan Kepariwisataan, didalam pelaksanaanya melibatkan banyak organisasi seperti Karang Taruna dan Pokdarwis di Kemiren sebagai pemuda dan terlibat secara lansung.

Kata Kunci : ***Sinergisitas, Pengembangan Desa Wisata. Pemerintah dan Masyarakat***

ABSTRACT

This study aims to describe the synergicity of the Government and the Society in the effort of developing the Tourism Village (Study in the Tribal Tourism Village of Osing Kemiren Glagah Sub-district of Banyuwangi Regency) which covers the Central, Regional and Village Governments and describes the form of cooperation or synergy between the Government and the community in developing the Tourism Village Adat Kemiren. The research method used qualitative approach. Source of data in obtaining primary and secondary data. Data collection through interview, observation, and documentation using purposive sampling. The analysis uses interactive model data analysis which includes, Data Collection, Data Reduction, Data Presentation, and Data Verification. In synergy of government and society in the effort of development of Kemiren Traditional Tourism Village. There are 3 forms of synergy: (1). Synergy of Policy on Tourism Village from Central Government to Village Government (2). Synergicity of Local Community Empowerment about human resources and also form of implementation of policy which have been made (3). The synergicity of community self-reliant activities that is a tradition of the Osing Society in Kemiren and initiated by the District Government to become the annual Festival agenda in order to be promoted to tourists. With the existence of three forms of synergistas, the Government and the Society have tried to develop the Tourism Village for the welfare of the community and are expected to empower the community and involve directly in order to feel the development of Tourism, in its implementation involving many organizations such as Karang Taruna and Pokdarwis in Kemiren as youth and involved directly.

Keywords: Synergy, Village Tourism Development. Government and Society

BAB 1 PENDAHULUAN

Pengembangan pariwisata Indonesia telah tercermin dalam rencana strategis yang dirumuskan oleh Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata RI, yakni (1) meningkatkan kesejahteraan masyrakat dengan membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta pemerataan pembangunan di bidang pariwisata (2) mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkesinambungan sehingga memberikan manfaat social-budaya, sosial ekonomi bagi masyarakat dan daerah, serta terpeliharanya mutu lingkungan hidup (3) meningkatkan kepuasan wisatawan dan memperluas pasar, dan (4) menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan pariwisata Indonesia berdayaguna, produktif, transparan , dan bebas KKN untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat , dalam institusi yang merupakan amanah yang dipertanggungjawabkan.

Pandangan Kementrian kebudayaan dan pariwisata RI, bahwa pengembangan pariwisata Indonesia harus didahului dengan pemahaman mengenai berbagai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi dalam merencanakan dan melaksanan pengembangan pariwisata.

Dalam hal pembangunan kepariwisataan ditegaskan dengan adanya dasar hukum pengembangan pariwsata sesuai dengan prinsip pengembangan adalah undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan tentang pembangunan kepariwisataan (pasal 6: pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang diwijudkan pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan , dan kekhas budaya dan alam , serta kebutuhan manusia untuk berwisata , pasal 8: 1).

Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu ODTW (obyek daya Tarik wisata) di Jawa Timur telah menetapkan didalam RPJM Tahun 2016-2021dan RPJP Tahun 2010-2025 sebagai dasar pembangunan Kabupaten Banyuwangi tentang arah kebijakan pengembangan pariwisata, sebagai berikut:

- Peningkatan pendapatan anggota masyarakat melalui kepariwisataan.
- Pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah.
- Peningkatan kemampuan anggota masyarakat untuk dapat memperoleh manfaat yang besar bagi kegiatan pariwisata.
- Terwujudnya masyarakat sadar wisata melalui sapta pesona, sehingga tercipta suasana yang mendukung dan menunjang semakin berkembangnya usaha dan kegiatan kepariwisataan.

Sebagai salah satu daerah destinasi wisata di Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi memiliki banyak obyek wisata yang menarik untuk dikembangkan, seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata seni dan budaya atau wisata lainnya. Akan tetapi ada salah satu wisata yang berbeda ketika para wisatawan berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi dari Kabupaten sebelum-sebelumnya yang tidak hanya sekedar menyajikan keindahan alamnya saja namuh lebih kepada interaksi masyarakat. Oleh karena itu sudah berkembang jenis wisata minat khusus, yaitu wisata alternatif yang disebut desa wisata adat suku osing yang terletak di Kemiren Kecamatan Glagah berjarak 5 km dari pusat pemeritahan Kabupaten dan 2 km dari pusat pemeruntahan kecamatan. Desa wisata disini menawarkan kegiatan wisata yang menekankan pada unsur-unsur pengalaman dan bentuk wisata aktif yang melibatkan wisatawan berhubungan lansung dengan

masyarakat setempat. Dengan ciri menonjolkan kelokalan budaya diharapkan desa wisata ni mampu bersaing dengan tempat wisata lain.

Pengembangan desa wisata ini harus memperhatikan kemampuan dan tingkat penerimaan masyarakat setempat yang akan dikembangkan menjadi desa wisata tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui karakter dan kemampuan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan desa wisata: 1) tidak bertentangan dengan adat istiadat budaya masyarakat setempat; 2) pengembangan fisik yang diajukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan desa; 3) memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian; 4) memberdayakan masyarakat desa; 5) memperhatikan daya dukung dan daya tamping serta berwawasan lingkungan.

Objek wisata ini menawarkan suasana alam pedesaan yang mengingatkan wisatawan akan nuansa alami dan tradisional serta budaya yang kental, Sebagai desa wisata yang berpotensi di kabupaten Banyuwangi, desa wisata adat suku osing di Desa Kemiren tentu saja telah memberikan kontribusi bagi masyarakat setempat dan yang terpenting meningkatkan kualitas hidup dari kemiskinan, sesuai dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri No: PM.26/UM.001/MKP/2010 yakni meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wialayahnya serta meningkatkan modal masyarakat seperti kesadaran kritis, potensi sosial dan budaya serta kearifan local.

Demikian peran masyarakat dalam penentuan pengembangan desa wisata adat di Kemiren memerlukan perhatian khusus agar mampu bersaing dengan wisata lainnya dan mampu bertahan dengan adanya modernisasi dijaman seperti saat ini. Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul "Sinergitas Pemerintah Dan Masyarakata Dalam Upaya Pengembangan Desa Wisata Di Wisata Adat Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi". Dengan harapan mampu menghasilkan penelitian penelitian baru yang dapat menjadi acuan pada penelitian berikutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sinergisitas

Sinergitas berasal dari kata sinergi, dapat disebut pula dengan sinergisme ataupun sinergisitas. Dalam kata pengantar pada Jurnal Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2005-2010 Sulawesi Utara karya Sarundajang mengatakan, sinergi mengandung arti kombinasi unsur atau bagian yang dapat menghasilkan pengeluaran yang lebih baik atau lebih besar. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sinergi berarti kegiatan atau operasi gabungan Menurut Covey yang dikutip melalui jurnal pembangunan pada student jurnal mengartikan sinergisitas sebagai Kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri-sendiri, selain itu beberapa unsur akan menghasilkan suatu produk yang lebih unggul. Oleh sebab itu, sinergisitas dalam pembanguna nberarti keterpaduan berbagai unsur pembangunan yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Covey menambahkan sinergisitas akan mudah terjadi bila komponen-kompoen yang ada mampu berpikir sinergi, terjadi kesamaan pandang dan saling menghargai (Diglib.Unila, 2011, chap. 2)

Melalui dua kesimpulan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa sinergitas dapat diartikan kegiatan gabungan atau kerjasama yang dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan terhubung oleh beberapa peran yang berbeda namun terkait didalamnya. Hal ini sesuai dengan penilitian yang diteliti oleh penulis, Oleh karena itu seluruh komponen masyarakat dan pemerintah diharapkan bersinergi agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.

B. Teori Peranan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status). Menurut Soekanto (2009) dalam buku sosiologi suatu pengantar bahwa Peranan (role theory) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara peranan dengan kedudukan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Keduanya tidak dapat dipisahkan karena satu yang tergantung pada pada yang lainya.

C. Konsep Pemerintah

Pemerintah merupakan kemudi dalam bahasa latin asalnya Gubernaculum. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk (penerapan hukum dan undang-undang) di kawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah berbeda dengan pemerintahan. Pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap jika dilihat dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan arti pemerintahan dalam arti luas adalah semua mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Jika pemerintah adalah lebih ke arah organ, pemerintahan menunjukkan ke arah bidang dan fungsi. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga tempat mereka menjalankan sebuah aktivitas.

D. Teori Kebijakan Publik

Menurut pendapat Carl Friedrich, kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan- hambatan dan kemungkinan kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Leo Agustino, 2006 : 7

E. Pengertian Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa inggris adalah society yang berasal dari kata latin socius yang berarti kawan. Istilah masyarakat berasa dari bahasa arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul , dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi.

Menurut ralph linton dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

F. Pengertian Desa Adat

Dalam UU No. 6/2014 BAB 1 Pasal 1 yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

G. Pemerintahan Desa Adat

Dalam UU No. 6/2014 Pasal 107-110 yakni Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat.

H. Masyarakat Hukum Adat

Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dalam UU No.6/2014 memenuhi syarat:

a) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
b) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan

Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

I. Kewenangan Desa Adat

Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan. Khusus kewenangan asal-usul dalam desa adat, Pasal 103 UU No. 6/2014 menegaskan sebagai berikut :

1. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
2. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;

3. Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
4. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
5. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

J. Pengertian Pariwisata.

Pariwisata terdapat pada Undang-Undang No.10/ 2009 tentang Kepariwisataan, pada Bab I pasal I mengenai ketentuan umum. Berdasarkan isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

K. Konsep Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata adalah upaya untuk lebih meningkatkan sumberdaya yang dimiliki oleh suatu obyek wisata dengan cara melakukan pembangunan unsur-unsur fisik maupun non fisik dari sistem pariwisata sehinggga meningkatkan produktifitas. Dalam hal ini yang dimaksud dengan produktifitas obyek wisata berupa meningkatnya pendapatan daerah yangdiperoleh dari kunjungan wisatawan yang masuk.

Dalam buku Pengantar Kepariwisataan menurut Nuryanti (1994) mengatakan bahwa Pada dasarnya pengembangan pariwisata adalah suatu proses yang berkesinambungan untuk melakukan matching dan adjustment yang terusmenerus antara sisi supply dan demand kepariwisataan yang tersedia untuk mencapai misi yang telah ditentukan (p. 24

L. Unsur-Unsur Pokok Pengembangan Pariwisata

Unsur pokok yang dapat menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangannya meliputi:

a) Atraksi

Atraksi merupakan pusat dari industri pariwisata. Menurut pengertiannya atraksi mampu menarik wisatawan yang ingin berkunjung. Atraksi atau daya tarik dapat timbul dari keadaan alam (keindahan panorama, flora fauna, sifat kekhasan perairan air laut/ danau),obyek buatan manusia (museum, katedral, masjid kuno, makam kuno dansebagainya), ataupun unsur-unsur dan peristiwa budaya (kesenian, adatistiadat dan makanan.

b) Fasilitas Pelayanan

Walaupun atraksi menarik wisatawandari rumah atau tempattinggalnya, namun fasilitas dibutuhkan untuk melayani mereka dalamperjalanan. Fasilitas ini maksudnya memberikan pelayanan dan menyediakansarana yang dibutuhkan para wisatawan, baik wisatawan asing maupunwisatawan domestik.

c) Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai atau bergerak darisatu tempat ke tempat lain dalam satu wilayah. Aksesibilitas dalam penelitianini menyangkut transportasi dan juga komunikasi-informasi. Dalam kegiatan pariwisata hanya mungkin berkembang dengan dukungan teknologi modern,khususnya di bidang transportasi dan komunikasi.

d) Infrastruktur

Infrastruktur adalah situasi yang mendukung fungsi fasilitas pelayanan,baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik diatas permukaantanah maupun di bawah tanah. Penyediaan infrastruktur tersebut meliputipenyediaan saluran air bersih, pembangunan sarana transportasi seperti jalandan terminal, penyediaan penerangan listrik, sistem komunikasi dan jugasaluran pembuangan limbah.

e) Akomodasi

Penyediaan akomodasi atau tempat menginap merupakan salah satusarana yang penting bagi para wisatawan. Akomodasi merupakan rumahkedua bagi para wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata dengan tujuanuntuk menginap. Fasilitas akomodasi menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi keberadaan suatu obyek wisata.

M. Pengertian Desa Wisata

Dalam Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata nomor :

KM.18/HM.001/MKP/201 pengertian Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

BABI III METODE PENELITI AN

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun dalam met ode yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interprestasi tepat melukiskan secara akurat sifat sifat dari beberapa fenomena, kelompok atau individu, menent ukan frekuensi terjadinya suatu keadaan.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wisata Adat Osing Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi dan penelit i an ini dilaksankan pada tanggal 25 Februari 2018-sel esai. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode obsevasi wawancara dan dokumentasi . Penelitian ini menggunakan metode analisis data teori Miles dan Huberman(2007: 20) dengan mel alui tiga tahapan yaitu:

1 .Reduksi data

2. Display data

3.Pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

BAB IV PEMBAHASAN

Jumlah penduduk Desa Kemiren 2491 orang yang terdiri dari 1230 orang laki-laki, dan perempuan 1261 orang, termasuk 894 orang kepala keluarga. Desa Kemiren telah ditetapkan sebagai desa adat suku osing yang sekaligus dijadikan cagar budaya untuk melestarikan budaya osing. Penelitian ini dilakukan di Desa Kemiren, Kec. Glagah, Kab. Banyuwangi. Kemiren adalah salah satu desa yang dijadikan desa wisata, terletak strategis di wilayah perjalanan menuju wisata Kawah Ijen, desa ini memiliki luas 117.052 m2 memanjang hingga 3 km yang di kedua sisinya dibatasi oleh dua sungai, Gulung dan Sobo yang mengalir dari barat ke arah timur. Desa yang berada di ketinggian 144 m di atas permukaan laut yang termasuk dalam topografi rendah dengan curah hujan 2000 mm/tahun sehingga memiliki suhu udara rata-rata berkisar 22-26°C ini memang cukup enak dan menarik dari sudut suhu udara dan pemandangan untuk wisata.

A. Sinergistas Kebijakan Publik

Dalam analisis kebijakan mengidentifikasi terhadap factor – factor penentuan dalam setiap tahapannya. Hal ini beragam masalah – masalah kebijakan untuk pengembangan Desa Wisata yang harus

dilanjutkan oleh Pemerintah Pusat diimplementasikan aparat pemerintah dalam berbagai level, berikut adalah dasar hukum pemerintah pusat, daerah sampai pemerintah desa untuk menjalankan kebijakanya dalam pengembangan Desa Wisata Kemiren dimana setiap kebijakan saling berkaitan antara satu dengan yang lainya.

Lembaga	**Level**	**Produk**
Pemerintah Pusat	Inisiator	UU No.10/ 2009 (KEPARIWISATAAN)
Kementrian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Inisiator	1. PP No. 50/2011 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025 2. PM.26/UM.001/MKP/ 2010 Program Nasional Mandiri Pariwisata melalui Desa Wisata
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi	Inisiator	1. Keputusan Perbup No. 401 Tahun 1996 (penetapan lokasi Desa Wisata di desa kemiren) 2. Perda No. 13 Tahun 2012 (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi)\ 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 1/2017 tentang Desa Wisata
Pemerintah Desa Wisata Kemiren	Inisiator	1. No. 188/ KEP/429.503.02/2015 tentang RPJM-Des 2016-2021 dalam BAB V 2. Peraturan Desa Kemiren Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Lembaga Adat
Masyarakat Kemiren	Implementor	Segala bentuk implementasi seperti Kegiatan, dll dari produk Inisiator yang dijalankan.

B. Sinergisitas Pemberdayaan Masyarakat Lokal

1). Bantuan Kementrian Pariwata melalui PNPM Kepada Masyarakat Kemiren Pada tahun 2010 pertengahan Kementerian Pariwisata memberikan bantuan melalui PNPM Pariwisata berupa satu set alat music tradisional yang biasanya digunakan untuk mengiringi tari gandrung. Hal ini dilakukan oleh Kementerian pariwisata untuk mengapresiasi akan budaya dari masyarakat suku adat osing yang berada kemiren masih tetap terjaga, karna tari gandrung merupakan lambang/icon bagi kota banyuwangi. Bantuan alat-alat tersebut diterima langsung oleh kelompok masyarakat kesenian kemiren.

2). Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat Melalui Pengelolaan Homestay Desa Kemiren Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kementerian Pariwisata (Kemenpar) melalui homestay. Dukungan itu diwujudkan melalui pelatihan dan bantuan kepada pengelola Homestay Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Pelatihan pengelolaan homestay itu dilaksanakan pada

tanggal 9-10 September 2017 hari sabtu sampai minggu. Ketua Tim Percepatan Homestay Kementrian Pariwisata Vitria Ariani ikut terjun langsung mengawal materi pelatihan Pengelolaan Homestay. Dan adapun bantuan yang diberikan berupa 55 Almari Pakaian, 55 Tempat sampah, 55 Cover Bad, 10 Tong Sampah, 6 Clossed dan 6 HT. Keseriusan dan antusias masyarakat Desa Kemiren dalam mengelola homestay dibuktikan dengan Beberapa pertanyaan yang dilontarkan Bapak Arief Yahya Menteri pariwisata terkait desa wisata dan Sapta Pesona bisa dijawab dengan baik oleh warga.

3). Workshop Percepatan Pengembangan Destinasi Wisata Perdesaan dan Perkotaan Pada bulan November, dalam rangka mengembangkan Destinasi Wisata di Perdesaan dan Perkotaan, Kementerian Pariwisata mengundang 10 (sepuluh) Patriot Desa Wisata untuk diberi bekal dan Pelatihan untuk pengembangan Desa Wisata, kegiatan ini merupakan hasil dari Rangkaian kegiatan Rakornas Pariwisata II-2017 dan kegiatan ini dilaksanakan pada hari kamis sampai jumat pada tanggal 28-29 November 2017 bertempat di Hotel Grand Cemara jalan Cemara No. 1 Jakarta Pusat. Dalam Workshop kali ini di nara sumberi langsung oleh Bpk. Lokot Ahmad Enda dan Bu Vitria Ariani dari Deputi bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata dan di hadiri oleh Bpk. Supriyanto selaku Kaur Perencanaan yang mewakili pemerintah desa kemiren. Desa wisata digagas sejalan dengan karakter dan potensi desa di Indonesia, sebanyak 74.954 tersebar di seluruh nusantara, dengan 1.902 di antaranya sudah memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi Desa Wisata.

4). Pelatihan Guide Kepada Pemuda-Pemudi di Desa Kemiren**,** Pemerintah Desa Kemiren bersama Universitas 17 agustus Banyuwangi melaksanakan sosialisasi Pelatihan to be guide dalam upaya memperdayakan pemuda-pemudi agar lebih produktif menjadi pendamping wisatawan yang akan mengunjungi obyek wisata di desa wisata kemiren. Munculnya wisata-wisata yang ada di desa tersebut merupakan salah satu potensi, asset, dan juga sumberdaya alam yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Potensi wisata tersebut dapat dijadikan salah satu unit usaha BUMDesa sebagiamana ditulis dalam pasal 3 dalam peraturan desa nomor 3 tahun 2016 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa tujuan pembentukan BUMDes :

1. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuanpemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
2. Mengembangkan potensi Perekonomian di wilayah pedesaan untuk mewujudkan kelembagaan yang tangguh dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat .
3. Menciptakan lapangan kerja.
4. Mengoptimalkan pengembangan potensi Desa.
5. Mengentaskan Kemiskinan.

Kelompok sadar wisata (Mpok Darwis) yang saat ini menjadi pengelola obyek wisata di desa tersebut bisa menjadi salah satu unit usaha yang berfokus pada pengelolaan obyek wisata di kawasan desa wisata Kemiren tersebut dengan BUMDES menjadi induk lokomotif perekonomian di desa.

5). Pembuatan Amenitas dalam Pengembangan Desa Wisata Kemiren Pemerintah Desa Kemiren bersinergi dengan BUMDES untuk membuat unit usaha yang bernama Warung Kemangi yang biasa disebut Pesantogan Kemangi adalah salah satu usaha warung yang bernuansa tradisional namun berwawasan internasional. Pesantogan Kemangi sendiri memliki makna pesantogan adalah tempat singgah dan kemangi ialah kenangan manis di Banyuwangi. Meskipun masih tergolong usaha kecil atau menengah tetapi warung ini sangat banyak diminati para konsumen.

Dengan ciri makanan khas osing, Warung Kemangi berawal pada tahun 2016 di Desa Kemiren, Pemerintah desa memberi pinjaman modal awal : Rp.8.000.000, Penyertaan modal dari pemerintahan desa pada Tahun 2015 serta memberi bantuan, Jenis bantuan yang pernah diterima yaitu 2 tikel Rumah Adat osing yang digunakan sebagai tempat usaha. BUMDES Kemiren sebagai pendiri sekaligus yang menaungi warung kemangi dimana yang mengelola adalah pemuda kemiren atau biasa yang disebut KARANG TARUNA MEKARSARI Desa Kemiren. adapun dalam pembagian hasil yakni 40 % dari hasil laba akan diserahkan ke BUMDES, disisihkan 10% untuk fakir miskin dan yatim piatu, untuk 50 % nya diserahkan ke pesantogan kemangi. Dengan adanya warung kemangi menjadi salah satu pusat tempat keramaian di desa kemiren oleh wisatawan yang sering berkunjung untuk menikmati menu yang disajikan, dampak dari keramaian tersebut

membuka lapangan kerja bagi beberapa masyarakat kemiren dari bekerja dan membuat makanan ataupun jajanan. Selain pesantogan kemangi BUMDesa memiliki Usaha Artshop yang memegang peranan dalam memajukan perekonomian Desa Kemiren. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, Arsthop juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Desa Kemiren agar menjadi desa yang maju dalam mengembangkan usaha. Saat ini Artshop telah berkontribusi besar pada pendapatan desa. Usaha yang dikelola pemuda karang taruna desa kemiren yang dibina langsung oleh BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Kemiren dan dikelola oleh para pemuda karang taruna desa kemiren. Artshop dan Sablon Kemangi ini berdiri sejak 20 Oktober 2015 yang beranggotakan 7 orang pemuda yang terdiri 4 laki-laki di bagian Sablon Kemangi dan 3 anggota perempuan di bagian Artshop Kemangi.

6). Sinergisitas Kegiatan Swadaya Masyarakat Kemiren.

a. Festival Barong Ider Bumi
b. Festival Ngopi Sepuluh Ewu
c. Tumpeng Sewu
d. Festival Jajanan Khas Desa Kemiren

Dengan adanya kegiatan keswadayaan masyarakat pemerintah daerah berhasil mempromosikan dan menaikan eksistensi Desa Wisata Kemiren namun hanya untuk mengeksplor nilai-nilai yang sudah ada dan nampaknya mulai ada penggerusan semata-mata diekspos untuk wisatawan dank arena untuk meningkatkan kunjungan wisatawan yang akan berujung pada pendapatan ekonomi tanpa berpedoman pada nilai tradisi.

7) Dampak Kebijakan dalam Sinergisitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Upaya Pengembangan Desa Wisata Adat Suku Osing Kemiren.

- Data Kunjungan Wisatawan Desa Wisata

NO	TAHUN	WISATAWAN DOMESTIK	WISATAWAN MANCANEGARA	TOTAL
1	2012	4287	26	4313
2	2013	4312	37	4349
3	2014	5163	32	5195
4	2015	5317	39	5356
5	2016	5368	43	5411
6	2017	24442	65	24507

Sumber: data dari Pokdarwis Kencana Kemiren, 2018

- **Hasil Pendapatan Dari Pariwisata**

No	Tahun	Omzet Kas Desa dalam Rupiah	Pengelolaan BUMDes dalam Rupiah
1	2015	Rp 72.000.000	Rp 6. 000. 000
2	2016	Rp 78.000.000	Rp 7. 500. 000
3	2017	Rp 84.000.000	Rp 9. 000. 000

Sumber: data dari Pokdarwis Kencana Kemiren, 2018

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan oleh peneliti di bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa sinergistas pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengembangan desa wisata di wisata adat suku osing kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi secara nyata terlaksana di desa kemiren, dimana pemerintah pusat yakni kementerian pariwsata dan pemerintah kabupaten banyuwangi dinas pariwisata dan pemerintah desa memeiliki cara tersendiri dengan tujuan yang sama untuk membina dan memberdayakan masyarakat serta merangkul seluru kalangan masyarakat untuk ikut secara langsung dan bersinergi dengan kepala adat, karang taruna, mpokdarwis, Bumdes, dan stakeholder dalam mengembangkan desa wisata kemiren sehingga terbentuknya paket wisata yang menambah atmostfer wisatawan dikemiren dan hasil sinergisitas ini terbukti dengan jumlah wisatawan yang hadir di desa kemiren bertambah setiap tahunnya. Hal ini sesuai perda Banyuwangi no. 1 tahun 2017 tentang desa wisata dimana tujuan pengembangan desa wisata sendiri dalam pasal 3 adalah untuk menyejahterkan rakyat seta terjalinya hubungan timbal balik wisatawan dengan masyarakat setempat agar terlibat secara langsung dalam pengembangan desa wisata.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian maka saran yang terkait sinergisitas pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengembangan desa wisata di desa wisata adat kemiren kecamatan Glagah Kabupaten banyuwangi yaitu: diharapkan pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata untuk meningkatkan lagi terkait dengan UMKM yang ada di di desa kemiren untuk lebih di kembangkan agar memeliki produk selain kopi “jarang goyang” karena melihat potensi yang begitu besar di Desa Kemiren seperti dari sektor alam banyaknya pohon aren dan dari sektor

SDM beberapa masyarakat pengerajin ukiran sehingga potensi yang ada dapat diberdayakan dan menjadi produk asli desa wisata Kemiren.

DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku:

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta. 2002.

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. *Pembangunan Kawasan Unggulan Minat Khusus Petualangan Kalimantan Timur*. Jakarta: Direktoral Jenderal Pengembangan Produk Pariwisata. 2001.

Refrensi Artikel;

Indonesia. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. *Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Sektor kebudayaan dan Pariwisata (PNPM) Pariwisata*. 2008. Retrevied January, 20, 2018 from http://www.kemenpar.go.id/

Effendi, Tadjuddin Noer. *Srategi Pengembangan Masyarakat: Alternatif Pemikiran Normatif, dalam Jurnal Sosial Politik, Fakulta Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada, Volume 3 No.2. 1999.*

Refrensi UU:

Indonesia. *Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kepariwisataan*

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. *PM.26/UM.001/MKP/2010 Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata*.

Pemerintah Daerah Banyuwangi. *Perda No. 13 Tahun 2012 Mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi.*

Peraturan Daerah Banyuwangi. *Perda No. 1 Tahun 2017 Mengenai Desa Wisata di Kemiren.*

Bupati Bayuwangi. *Keputusan Perbup No. 401 Tahun 1996 Tentang penetapan lokasi Desa Wisata di desa kemiren.*

Indonesia. *Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.* Bab XII, pasal 97,Lembaga Adat.

Pemerintah Desa Kemiren. RPJMDes 2016-2018

Refrensi Internet:

Lestari, Susi. Pengembangan Desa Wisata Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat. (2009). retrevieddesember22,2017,from http://download.portalgaruda.org/article.php?article

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
JEMBER